

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih tema mengenai keamanan regional wilayah Asia Tenggara karena Asia Tenggara merupakan wilayah strategis secara geopolitik yang tidak saja menyangkut sisi keamanan regional tetapi juga internasional. Pemilihan judul berdasarkan pada, *pertama*: Singapura sebagai negara yang berada pada posisi sentral lalu lintas perdagangan tidak hanya pada cakupan teritorial Asia tetapi juga dunia internasional yang memunculkan konsekuensi interaksi politik, sosial budaya dan keamanan tidak hanya dengan negara-negara disekitarnya seperti Indonesia dan Malaysia, tetapi juga dengan negara-negara lain di dunia. *Kedua*, adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam setiap konstelasi atau perkembangan politik dan keamanan di wilayah Asia Tenggara khususnya.

### B. Latar Belakang

Selat Malaka merupakan kawasan yang penting yang jadi urat nadi perekonomian Asia Tenggara dan memegang nilai strategis yang besar dari segi politik dan keamanan. Selat ini merupakan salah satu perairan paling sibuk di dunia.

Sejauh ini muncul anggapan dari masyarakat internasional terutama Amerika Serikat bahwa pihak negara-negara pantai yang berbatasan dengan perairan Selat Malaka tidak cukup melakukan tindakan nyata dalam menjamin keamanan mereka

untuk melintasi perairan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Selat Malaka masih membawa permasalahan-permasalahan seperti tindak kejahatan perompakan, resiko terorisme dan perdagangan illegal.

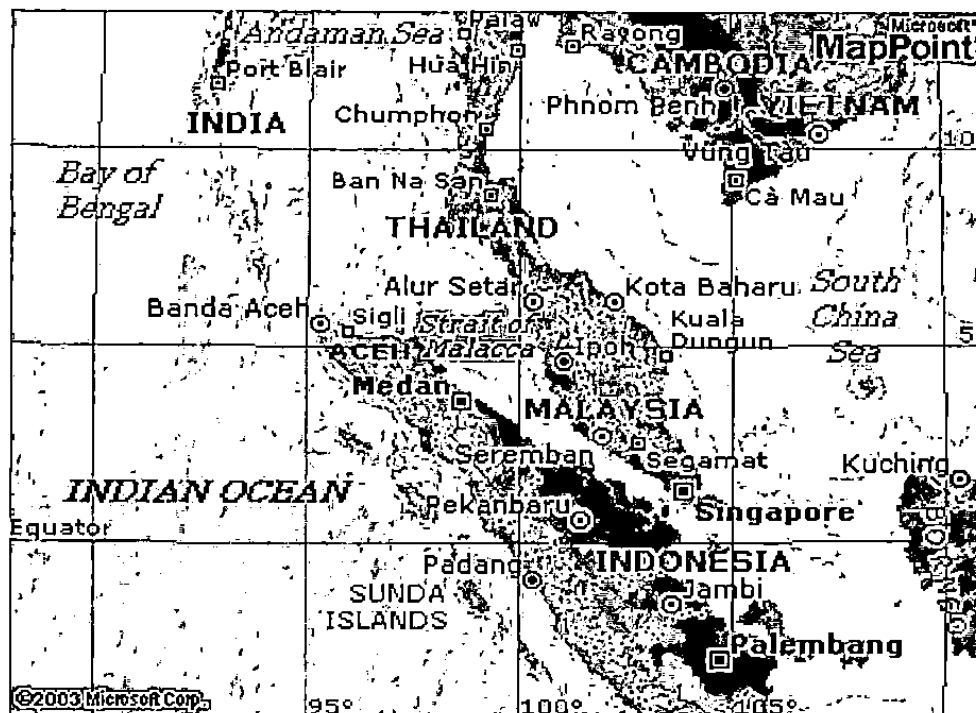
Sebagai contoh, data *International Maritime Bureau* (IMB) atau Biro Maritim Internasional menunjukkan, tahun 2002 di dunia terjadi 192 kasus (kejahatan) penculikan di atas kapal. Tahun 2003 jumlahnya meningkat menjadi 399 kasus. Sepertiga (139) peristiwa tersebut terjadi di perairan Indonesia dan mengutip data Biro Maritim Internasional (IMB) yang bermarkas di Singapura, surat kabar *Christian Science Monitor* (18 Maret 2004) menulis, peristiwa penyerangan kapal dagang di dunia tercatat 445 kasus pada tahun 2003. Naik 20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperempat peristiwa ini (121 kasus) terjadi di perairan Indonesia, Selat Malaka khususnya. Sementara di perairan Singapura dan Malaysia tercatat hanya 35 kasus. Atas ketidakpuasan tersebut, wajarlah jika muncul usulan dari AS untuk mengundang kekuatan asingnya dalam mengamankan perairan itu.<sup>1</sup>

Masih menurut *International Maritime Bureau* (IMB), kegiatan bajak laut (*pirate*) paling ramai terjadi di Selat Malaka. Frekuensinya terus meningkat, dari 335 kasus di tahun 2001 hingga 370 kasus di tahun 2002. Tahun lalu saja (2003), jumlah kasus perompakan telah mencapai hampir seperempat dari jumlah kasus perompakan di seluruh dunia. Maka, tidaklah mengherankan apabila IMB menyatakan bahwa Selat Malaka merupakan perairan yang paling berbahaya di dunia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/14/utama/1081345.htm> akses 25 September 2004.

**Gambar 1**  
**Peta Selat Malaka**



Sumber : <http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Straits-of-Malacca>

Perairan Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan Malaysia dan status tersebut membawa konsekuensi bahwa permasalahan keamanan di perairan itu merupakan yurisdiksi nasional. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa gangguan keamanan di perairan itu dapat membawa dampak luas mengingat fungsi dan posisi strategis dari jalur pelayaran tersebut. Singapura merupakan negara yang terdekat yang memungkinkan ikut merasakan ataupun terpengaruh terhadap dampak dari gangguan keamanan di perairan Selat Malaka, meskipun, diketahui bahwa Singapura tidak memiliki wilayah yurisdiksi di Selat Malaka.

Indonesia, Malaysia, Singapura dan juga terutama negara-negara ASEAN lainnya sepakat membentuk sistem keamanan regional bersama yang dalam kesepakatan *ASEAN Regional Forum* yang dituangkan dalam *ASEAN Security Community*, yang salah satunya menyangkut keamanan bersama perairan Selat Malaka.

*ASEAN Security Community* (ASC) merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembentuk kawasan Asia Tenggara selain komunitas ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan komunitas sosial budaya ASEAN (*ASEAN Socio Cultural Community/ASCC*) yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-9 di Nusa Dua Bali dalam satu dokumen penting Deklarasi Bali Concord II atau dinamai juga dengan ASEAN Concord II.

Ketiga pilar tersebut merupakan bagian penting dari Bali Concord II yang disahkan para kepala negara atau pemerintahan ASEAN. ASC merupakan usulan dari pihak Indonesia dalam mewujudkan suatu keamanan regional intra ASEAN. Namun, istilah keamanan tersebut bukan dalam pengertian militer, melainkan tatanan yang mewujudkan integrasi ekonomi melalui konsep komunitas.

Akan tetapi Singapura, sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi Bali Concord II tersebut justru menanggapi dengan mendorong Amerika Serikat

Malaka. Singapura dan Amerika Serikat menegosiasikan satu kerja sama keamanan dalam bentuk pakta keamanan yang strategis.<sup>3</sup>

Pada bulan April 2004, Panglima Armada Amerika Serikat (AS) di Pasifik Laksamana Thomas Fargo mengusulkan penempatan armada AS dalam pengamanan Selat Malaka. Usulan tersebut memicu polemik tentang pengamanan jalur pelayaran tersebut terutama bagi pihak Indonesia dan Malaysia. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 mengatur bahwa keamanan laut merupakan tanggung jawab dari negara pantai yang memiliki wilayah tersebut dan itu berarti bahwa Selat Malaka merupakan tanggung jawab Indonesia dan Malaysia. Perlu diketahui bahwa Singapura tidak memiliki wilayah yurisdiksi di Selat Malaka. Wilayah yurisdiksi Singapura hanyalah di Selat Phillips dan Selat Singapura, sementara Selat Malaka adalah wilayah yurisdiksi Indonesia dan Malaysia.<sup>4</sup>

"Kami akan memperdalam kerja sama dan hubungan kami dengan AS dalam hal keamanan," kata Menteri Koordinator Singapura bidang Keamanan dan Pertahanan Tony Tan di Singapura. Pembicaraan itu dilakukan sehari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush memutuskan menarik dan merelokasikan sekitar 70.000 anggota pasukannya di Asia dan Eropa.

Walau begitu, Tan yang juga dipercaya sebagai Deputy Perdana Menteri (PM) Singapura itu belum bersedia membeberkan jenis kerja sama atau pakta keamanan

---

<sup>3</sup> Lihat *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* dalam <http://www.aseansec.org>.

yang akan dibentuk bersama AS. Ia hanya mengatakan, hingga saat ini kedua pihak masih pada tahap membicarakan kerangka kerja sama keamanan yang strategis. Tan menegaskan, Singapura dengan tegas mendukung kehadiran militer AS di seluruh pelosok dunia, termasuk di Singapura. "Kami yakin, kehadiran militer AS di Asia Tenggara akan membantu stabilitas kawasan," ujarnya.<sup>5</sup>

Padahal ASEAN Security Community menekankan bahwa kerjasama ini lepas dari intervensi luar berdasarkan prinsip hukum internasional yang tertuang dalam butir ke-4 *Declaration of Bali Concord II* pada bagian *ASEAN Security Community*. Artinya dukungan Singapura kepada Amerika Serikat tersebut perlu dipertanyakan konsistensinya berkaitan dengan komitmen Singapura menandatangani dokumen *Declaration of Bali Concord II*.

### C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengemukakan suatu permasalahan yaitu: "Mengapa Singapura, sebagai bagian dari *ASEAN Security Community*, mendukung Amerika Serikat dengan melakukan kerjasama keamanan untuk membangun pangkalan militer di kawasan Selat Malaka ?"

### D. Tujuan Penulisan

Tujuan dilaksanakannya penulisan skripsi ini adalah

1. Sebagai bahan analisa dengan mengambil aspek perkembangan keamanan regional Asia Tenggara yang bersinggungan dengan wilayah politik internasional. Serta kemudian untuk mengetahui sejauh mana konsistensi negara-negara Asia Tenggara yang memiliki perilaku politik berbeda, khususnya Singapura, dalam interaksi sesama negara-negara Asia Tenggara dan hubungan internasional.
2. Sebagai sarana implementasi teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah terhadap fenomena sebagai aspek perkembangan keamanan regional Asia Tenggara yang bersinggungan dengan wilayah politik internasional.
3. Sebagaimana dalam proses hidup yang harus dijalani dengan ujian dan rintangan, penulis terinspirasi oleh Al-An Kabut: 2-3 yang artinya :” Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan ‘ kami beriman’ sedangkan mereka belum diuji lagi. dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka...”, jika penulis analogikan ayat diatas dengan kondisi penulis sekarang, maka tujuan penulisan skripsi ini juga adalah sebagai salah satu ujian dan salah satu syarat yang menempati hierarkis tertinggi untuk meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

## **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Untuk melakukan analisa atas permasalahan diatas, maka digunakan konsep pemikiran :

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional berdasarkan argumentasi Hans J.Morgenthau. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi, yang dianggapnya utopis bahkan berbahaya. Ia menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama.<sup>6</sup> Morgenthau membangun konsep, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional.

Kepentingan nasional adalah hasil kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bertentangan; ini bukan suatu ideal yang dicapai secara abstrak dan saintifik, tetapi merupakan hasil dari persaingan politik internal yang berlangsung terus menerus. Pemerintahlah, melalui berbagai lembaganya yang pada akhirnya



Kepentingan nasional didefinisikan sebagai tujuan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri. Kepentingan nasional dibagi kedalam 5 kategori umum yaitu <sup>9</sup>:

1. *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri.
2. *independence*, yang berarti mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada negara lain secara fisik maupun ekonomi.
3. *military security*, keamanan militer alias tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain.
4. *territorial integrity*, keutuhan wilayah nasional.
5. *economic well-being* alias kesejahteraan ekonomi.

### **Model Pembuatan Keputusan Aktor Rasional**

Kepentingan nasional yang didefinisikan oleh pemerintah suatu negara inilah yang menjadi dasar pembuatan keputusan aktor rasional. Dalam model aktor rasional, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu itu – melalui serangkaian

Jadi, unit analisis model pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu. Seorang analis dianggap sudah bisa menjelaskan suatu politik luar negeri kalau ia bisa menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sedang dipelajarinya. Itu merupakan pilihan yang layak mengingat tujuan strategis dari bangsa yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria "optimalisasi hasil." Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijaksanaan yang mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.<sup>11</sup>

Asumsi yang dibangun penulis adalah bahwa Singapura memiliki keinginan untuk dapat berperan mempunyai kekuasaan dominan di Asia Tenggara dengan tetap menjaga akses penting Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dunia yang sangat

mencoba tetap membangun basis basis kerjasama tidak hanya dengan negara-negara ASEAN terutama Indonesia dan Malaysia (seperti dalam *ASEAN Security Community*) yang bersinggungan langsung dengan territorial Selat Malaka, akan tetapi juga dengan Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan kepentingan nasional Singapura sendiri. Dengan begitu, Singapura dapat mengejar kekuasaan di Asia Tenggara.

Dengan melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat maka Singapura akan merasa lebih aman karena Amerika merupakan mitra kerjasama yang sangat membantu Singapura secara keamanan wilayah dari terorisme yang dianggap mengancam wilayah territorial Singapura. Selain itu kepentingan ekonomi Singapura sebagai negara yang strategis yang dilalui jalur perdagangan internasional merupakan timbal balik atas kepentingan ekonomi Amerika yang juga menggunakan jalur Selat Malaka sebagai jalur perdagangannya.

Di lain sisi, Singapura menganggap bahwa kerjasama *ASEAN Security Community* sebagai sesuatu kerjasama regional bukan merupakan suatu ikatan yang dapat memenuhi kepentingan pemerintahan Singapura yang memiliki kepentingan tersendiri di wilayah Selat Malaka. Singapura menganggap bahwa potensi ketidaksesuain dalam kerjasama regional ditambah dengan kecenderungan perbedaan ideologi diantara negara-negara yang berbatasan dengan Singapura.

membawa pada perilaku *deterrence*<sup>12</sup> politik rasional Singapura.

Penandatanganan Bali Concord II oleh Singapura bisa dianggap sebagai standar ganda Singapura yang diterapkan agar Singapura masih tetap mendapatkan tempat bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia dengan mengingat bahwa Singapura tidak mungkin lepas dari kerjasama-kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan negara-negara tersebut. Jika Singapura melepaskan diri dari kerjasama tersebut maka kerugian bagi Singapura bahwa Singapura terkucilkan dalam pergaulan regional Asia Tenggara karena wilayah teritorial Singapura berada di Asia Tenggara.

#### F. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan kerangka dasar pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan suatu hipotesa bahwa Singapura sebagai bagian dari negara yang terlibat dalam *ASEAN Security Community* – yang seharusnya mendukung sistem keamanan regional bersama Asia Tenggara tersebut - mendukung AS dalam rencana pembangunan pangkalan militer di kawasan Selat Malaka karena:

- Singapura selalu merasa tidak aman di kawasan Asia Tenggara menyangkut dalam wilayah teritorial Selat Malaka dan ingin menerapkan *security*

<sup>12</sup> Deterrence adalah hubungan psikologik dimana satu pihak meyakinkan pihak lain agar tidak menyerang karena serangan itu akan mengundang pembalasan yang setimpal. Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teoritis*, Pusat Antar Universitas, 1978, hal. 101

*deterrence* yaitu bahwa Singapura bermaksud menjaga pertahanan dan keamanan negaranya.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Agar penulisan tidak terlalu luas dan lebih terfokus kepada permasalahan yang ada maka dalam penulisan ini digunakan batasan-batasan pembahasan. Fokus pembahasan terbatas wilayah hubungan kerjasama keamanan Singapura dengan Amerika Serikat serta implikasinya terhadap kerjasama regional ASEAN yang pembahasannya diutamakan antara tahun 2000 sampai dengan 2004 dengan tetap menekankan interaksi-interaksi internasional yang penting dan masih bersinggungan dengan penulisan walaupun diluar jangkauan waktu tersebut.

### **H. Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, artinya dengan berdasarkan kerangka pemikiran atau teori kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data empiris. Pengumpulan data dalam penulisan ini akan dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literature, majalah, jurnal, tabloid, *surfing* dan *browsing internet* serta dari sumber-sumber lain yang ada.

## I. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi tentang pendahuluan berupa latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penulisan, metode pengumpulan dan analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II Memaparkan mengenai *ASEAN Regional Forum* beserta perkembangan serta konsekuensi-konsekuensi yang harus diambil oleh negara-negara ASEAN atas perjanjian-perjanjian bersama seperti *ASEAN Security Community*. Bab ini juga memaparkan kesepakatan-kesepakatan *ASEAN Security Community* yang akan menjadi unit analisa konsistensi Singapura terhadap kesepakatan tersebut.

BAB III Berisi pemaparan bukti inkonsistensi Singapura terhadap kesepakatan-kesepakatan *ASEAN Security Community* jika dihubungkan dengan rencana kerjasama keamanan Singapura dengan Amerika di Selat Malaka.

BAB IV Berisi analisa faktor inkonsistensi Singapura sebagai bagian *ASEAN Security Community* (ASC) terhadap rencana kerjasama keamanan dengan Amerika yang ingin diwujudkan pada rencana pembangunan pangkalan militer Amerika di Selat Malaka. Pemaparan berdasarkan pada analisa kepentingan nasional Singapura terhadap Selat Malaka ditambah dengan pemaparan kepentingan Amerika terhadap